

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN NGANJUK**



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
dan
BAB V PENUTUP.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Dinas Tenaga Kerja;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
 - t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - u. Dinas Pertanian;
 - v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - w. Sekretariat Daerah;
 - x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - aa. Badan Pendapatan Daerah;
 - bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - cc. Inspektorat Daerah;
 - dd. Kecamatan Bagor;
 - ee. Kecamatan Baron;
 - ff. Kecamatan Berbek;
 - gg. Kecamatan Gondang;
 - hh. Kecamatan Jatikalen;
 - ii. Kecamatan Kertosono;
 - jj. Kecamatan Lengkong;
 - kk. Kecamatan Loceret;
 - ll. Kecamatan Nganjuk;
 - mm. Kecamatan Ngetos;
 - nn. Kecamatan Ngluyu;
 - oo. Kecamatan Ngronggot;
 - pp. Kecamatan Pace;
 - qq. Kecamatan Patianrowo;
 - rr. Kecamatan Prambon;
 - ss. Kecamatan Rejoso;

- tt. Kecamatan Sawahan;
 - uu. Kecamatan Sukomoro;
 - vv. Kecamatan Tanjunganom;
 - ww. Kecamatan Wilangan; dan
 - xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan dari setiap daerah.

Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rapat paripurna DPRD. Rencana strategis dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu lima tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029. RPJMD disusun berdasarkan pedoman sebagaimana dalam peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemandu kegiatan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, RPJMD sebagai bagian dari system perencanaan tersebut, dalam proses penyusunannya harus melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Kabupaten Nganjuk. RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 akan berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta program daerah berikut dengan

pendanaan indikatif. RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Untuk menjamin pelaksanaan RPJMD secara baik maka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa dan Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penerapan dan pengembangan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab (*akuntabel*). Dalam Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Adapun RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang, RPJMD Kabupaten Nganjuk akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD setiap tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan RKA PD (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-*

down) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 ETY tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo -

- Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 ;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
- d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

- 1.2. Landasan Hukum;
 - 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
 - 1.4. Sistematika Penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
 - 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
 - 2.2.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;
 - 3.2. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;
 - 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
 - 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.
- BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

I. TUGAS POKOK

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

II. FUNGSI

Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

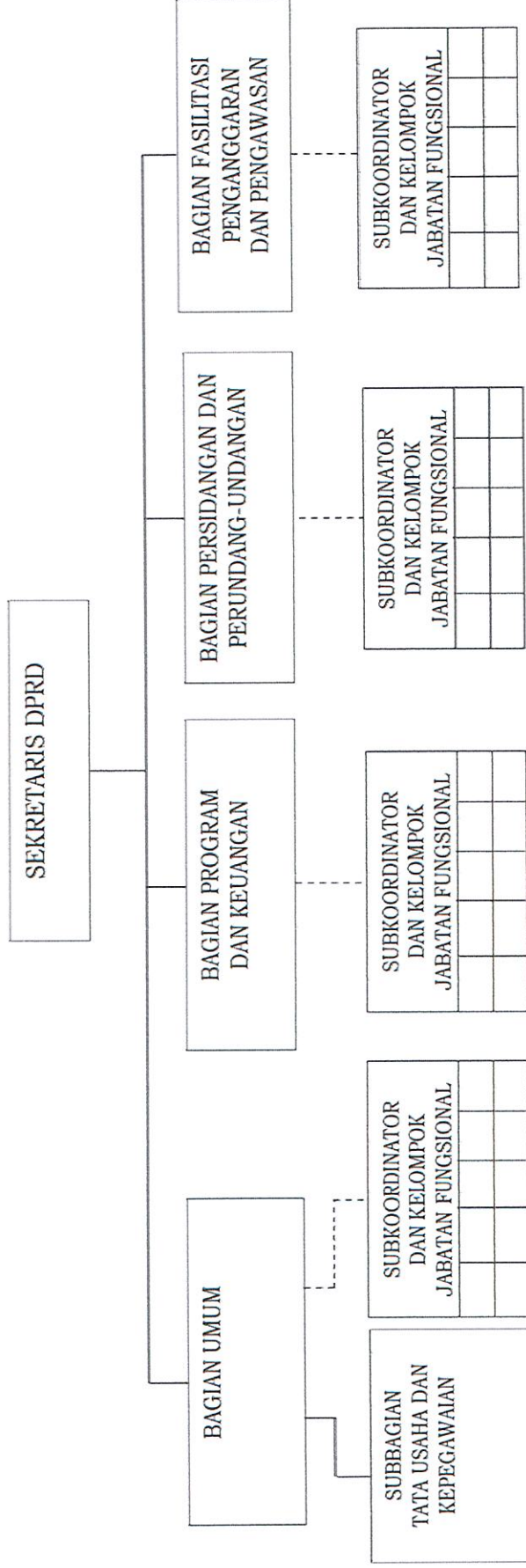
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi bersifat khusus Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai kedudukan yang strategis yakni Unit pelayanan kepada Lembaga Legislatif daerah yang merupakan pengejawantahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara Administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Sekretariat DPRD digambarkan sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK**



2

2.1.1. Rincian Tugas

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

1.1 Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- b. melaksanakan kearsipan dan perpustakaan;
- c. menyusun administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urutan kepangkatan dan formasi pegawai;
- h. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD;
- i. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Sekretariat DPRD; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Program dan Keuangan Bagian Program dan Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD. Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- e. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- f. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- g. pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- h. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- i. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- j. pengoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- k. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- l. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- m. pelaksanaan analisis laporan kinerja sekretariat DPRD; pelaksanaan analisis laporan keuangan sekretariat DPRD; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persidangan serta menyusun produk hukum daerah sesuai kewenangan DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif;
- d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;



- e. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. penyusunan risalah rapat;
- h. pelaksanaan koordinasi pembahasan Raperda;
- i. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- j. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- k. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan publikasi;
- m. penyelenggaraan keprotokolan;
- n. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Sekretaris DPRD;
- o. pelaksanaan fasilitasi penerimaan tamu; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan APBD/APBDP;
- c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
- f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;

- i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokokpokok pikiran DPRD;
- m. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

I. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025 adalah 26 orang. Data pegawai menurut Golongan dan Jabatan adalah:

**Tabel 2.1 Data Administrasi Kepegawaian
Menurut Golongan dan Jabatan**

| U R A I A N | Satuan | Jumlah |
|------------------------------|--------------|-----------|
| a. Jumlah ASN | | |
| 1) Golongan I | Orang | 0 |
| 2) Golongan II | Orang | 4 |
| 3) Golongan III | Orang | 14 |
| 4) Golongan IV | Orang | 2 |
| 5) PPPK | Orang | 6 |
| Jumlah | Orang | 26 |
| b. Jumlah Pejabat Struktural | | |

| URAIAN | Satuan | Jumlah |
|------------------------------|--------------|-----------|
| 1) Eselon II | Orang | 1 |
| 2) Eselon III | Orang | 2 |
| 3) Eselon IV/Sub Koordinator | Orang | 5 |
| c. Jumlah Staf ASN | Orang | 18 |
| Jumlah | Orang | 26 |

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2025

Sedangkan data pegawai menurut jenjang pendidikan yang pernah dilalui adalah :

Tabel 2.2. Data Administrasi Menurut Tingkat Pendidikan

| No | URAIAN | Satuan | Jumlah |
|---------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| 1 | Lulusan SD | Orang | - |
| 2 | Lulusan SLTP | Orang | - |
| 3 | Lulusan SLTA | Orang | 10 |
| 4 | Lulusan D2 | Orang | - |
| 5 | Lulusan D3 | Orang | 1 |
| 6 | Lulusan S-1/D4 | Orang | 7 |
| 7 | Lulusan Pasca Sarjana / S-2 | Orang | 8 |
| 8 | Lulusan Pasca Sarjana / S-3 | Orang | - |
| Jumlah | | Orang | 26 |

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah tenaga Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yang berstatus ASN pada tahun 2025 sebanyak 26 orang.

II. Aset / Modal

Pembangunan Daerah tidak dapat terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana Daerah yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pelayanan air minum, telepon dan listrik menjadi hal

yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan para pegawai. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan daerah kedepan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Sarana perlengkapan yang ada berupa peralatan adalah sebagai berikut :

- Meja kerja
- Meja rapat
- Kursi kerja
- Kursi rapat
- Lemari kayu
- Lemari Arsip
- Komputer
- Printer
- Audio Visual
- Running Text Nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD
- Papan Pengumuman
- Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua dan Roda Empat
- Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat
- Brankas
- AC
- Kipas angin
- Peralatan jaringan
- Laptop
- LCD proyektor
- Video Wall
- Televisi

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

I. Pelayanan administrasi

Di dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai pelaksana administrasi semua kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk selama ini masih perlu ada peningkatan, walaupun jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk 50 (Lima Puluh) anggota kinerja



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk harus tetap ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai tugas menampung aspirasi masyarakat menuntut setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senantiasa dekat dengan masyarakat. Terkait hal tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk harus selalu siap dan reaktif untuk memberikan pelayanan kepada publik / masyarakat, untuk itu sekretariat DPRD dituntut untuk mampu memberikan akses kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan DPRD serta mengetahui dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPRD.

II. Peningkatan SDM

Dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, dimana masyarakat Kabupaten Nganjuk sudah semakin kritis dan semakin reaktif terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah. Seluruh elemen masyarakat dewasa ini telah sadar bahwa mereka juga harus ikut berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

Terjadi paradikma dalam masyarakat bahwa untuk dapat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan cara masuk ke dalam lembaga pembuat kebijakan. Hal tersebut telah membawa arah pikiran masyarakat kita bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang dapat dijadikan tempat atau tumpuan masyarakat untuk dapat menyalurkan misi perjuangannya yang akhirnya membuat kompetisi menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semakin ketat.

Akan tetapi semakin ramainya perebutan kursi dewan perwakilan rakyat daerah Sebagian besar anggota legislatif berlatar belakang pengusaha / wiraswasta dan Strata pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut perlunya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai pemberi layanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk harus meningkatkan kualitas yang didukung oleh tenaga – tenaga yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang merata serta mempunyai kompetensi di dalam memberikan pelayanan sebagai pemberi kajian – kajian dan masukan yang berlandaskan peraturan perundangan-undangan.

Tabel 2.3.1
Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi

| No. | Jenis Fraksi | Jumlah Anggota DPRD Periode 2024-2029 |
|-----|---------------|---------------------------------------|
| 1. | PDIP | 11 |
| 2. | PKB | 9 |
| 3. | GERINDRA | 7 |
| 4. | DEMOKRAT | 6 |
| 5. | HANURA | 6 |
| 6. | NASDEM | 7 |
| 7. | GOLKAR | 4 |
| | JUMLAH | 50 |

Sumber : Susunan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target Indikator | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|----|---|------------------|---------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|------|--------|
| | | | Tahun | | | | | Tahun | | | | | Tahun | | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD | 83 | Baik | Baik | 80 | 80 | 83 | Baik | Baik | 83,95 | 87,26 | 86,22 | 81,39 | 100 | 100 | 100 | 103,87 |

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk
Tahun Anggaran 2020-2024

| No. | Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan Anggaran | Realisasi | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--------|----------|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|----------|----------|--|--------|----------|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 37.303.6 | 92.311 | 39.783.9 | 40.638.4 | 40.997.7 | 34.701 | 34.701 | 37.442.6 | 38.770.8 | 39.821.2 | 34.701 | 34.701 | 37.442.6 | 38.770.8 | 39.821.2 | 34.701 | 34.701 | 37.442.6 | 38.770.8 | 39.821.2 | 93,02 % | 91,55 % | 95,40 % | 97,13 % | | |
| 2. | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | 28.579.1 | 55.270 | 34.405.6 | 41.072.9 | 38.563.5 | 19.529 | 19.529 | 29.754.5 | 36.811.7 | 33.595.0 | 19.529 | 19.529 | 29.754.5 | 36.811.7 | 33.595.0 | 19.529 | 19.529 | 29.754.5 | 36.811.7 | 33.595.0 | 68,33 % | 85,07 % | 89,24 % | 87,12 % | | |
| | | | | 42.135 | 42.523 | 87.055 | .344.9 | 58.243 | 57.585 | 22.093 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA. 2024

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan 20indicator20n daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing 20indicator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

| No. | Interval Nilai | Predikat |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | $\geq 91\%$ | Sangat Tinggi |
| 2. | $76\% \leq 90\%$ | Tinggi |
| 3. | $66\% \leq 75\%$ | Sedang |
| 4. | $51\% \leq 65\%$ | Rendah |
| 5. | $\leq 50\%$ | Sangat Rendah |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat yang membantu tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk dituntut semakin cepat, tepat serta mampu melaksanakan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi. Dalam mendukung dan melayani Tugas pokok dan fungsi DPRD tentunya adanya tuntutan Kinerja yang Maksimal dan Pelayanan Prima sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Pelayanan yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tentunya terdapat permasalahan-permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berkompenten pada bidangnya | Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal | Kurangnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan bekerja secara totalitas dan memahami target kinerja yang akan dicapai |
| | | Masih kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Fasilitas ruang rapat dan kerja yang kurang memadai untuk mendukung kelancaran tugas alat kelengkapan dewan |
| | | Kurangnya Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD yang berkompeten | Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD kurang sesuai dengan bidang dan keahliannya |
| | | | |

Sekretariat DPRD juga mengidentifikasi permasalahan dari sisi Pendukung dan Penghambat yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan

kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*thread*). Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1. Kekuatan :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup;
- b. Tersedianya Tata Tertib DPRD, berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- c. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup;
- e. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kelemahan :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD;
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti kemampuan sumber daya aparatur;
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

2. Ancaman/Tantangan :

- a. Adanya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah;

- b. Adanya perkembangan Globalisasi yang serba Elektronik Baik Pelaporan dan Perencanaan;
- c. Adanya hambatan – hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yang dapat dijadikan acuan antara lain gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk. Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Struktur Organisasi yang baru mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi terhadap fungsi tugas dan wewenang anggota DPRD yang secara tegas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota dan Peraturan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Nganjuk. Fungsi DPRD yaitu sebagai lembaga legislasi, anggaran dan, pengawasan. Adapun tugas dan wewenang DPRD antara lain :

- a. Membentuk peraturan daerah bersama bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh bupati.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- d. Memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan Jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 Bulan;
- e. Mengusulkan pengangkatan/pemberhentian Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari urian diatas guna menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya maka peran Sekretariat DPRD sangatlah penting sebagai lembaga yang bertugas memfasilitasi semua kegiatan anggota DPRD sehingga kinerja yang dihasilkan benar-benar optimal. Dengan memberikan fasilitasi pelayanan yang prima sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk memperoleh kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan. Di dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah hanya ditinjau dari gambaran pelayan Perangkat Daerah yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD berdasarkan identifikasi selama pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPRD, yaitu Perlunya Peningkatan Kompetensi Sumber daya aparatur dan dukungan Sarana prasarana dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD.

**Tabel 2.2.2
Teknik Merumuskan Isu Strategis PD**

| Potensi Dasar | Permasalahan PD | Isu KLHS | Isu Langsung | | | Isu Strategis PD |
|--|---|--|---|---------------------------------------|------------------------------|--|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal | Fasilitasi Pembahasan KLHS dalam Proses Legislasi Daerah | peningkatan standar tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan praktik global | Transparansi & Akuntabilitas Anggaran | Keterbukaan Informasi Publik | Peningkatan Kompetensi Sumber daya aparatur dan dukungan Sarana prasarana dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD |



| Potensi Dasar | Permasalahan PD | Isu KLHS | Isu Langsung | | | Isu Strategis PD |
|---------------|--|--|---|---------------------------------|--|------------------|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| | Masih kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Sinkronisasi KLHS dengan Anggaran | Sekretariat DPR sering menjadi "jembatan" agar DPR bisa ikut aktif dalam forum parlemen dunia | Pengelolaan SDM & LHKPN | Kinerja Pelayanan Sekretariat terhadap Kepuasan Anggota DPRD | |
| | Kurangnya Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD yang berkompeten | Penguatan Kapasitas DPRD dalam memahami KLHS | DPR sebagai institusi pusat menghadapi tekanan publik | Digitalisasi & Keterbukaan Data | | |
| | | Pengawasan Implementasi KLHS | | Kinerja Legislasi & Isu Rakyat | | |

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

3.1.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Visi Kepala daerah dan Wakil Daerah Terpilih Adalah Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat Dan memiliki Misi Sebagai Berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan MYE, serta dapat memelihara kerukunan, ketenterama, dan ketertiban;
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalauai penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi local;
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna;
7. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan salah satu OPD pelaksanaan Misi ke 2 (dua) yaitu : “Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien



melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan” dengan mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk pada Rencana strategis Tahun 2025-2029 Menetapkan tujuan " *Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD* ". Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitas dan Pelayanan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3.1.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah "*Meningkatnya kecepatan dan ketepatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD*".

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | INDIKATOR (04) | BASELINE 2024 (05) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN (12) | |
|---|--|--|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| | | | | | 2025 (06) | 2026 (07) | 2027 (08) | 2028 (09) | 2029 (10) | 2030 (11) | | |
| 4.02.0.00.0.00.04.0000 - Sekretariat DPRD | | | | | | | | | | | | |
| - Meningkatkan kualitas layanan publik | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (%) | 86 | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | |
| | | Meningkatnya kecepatan dan ketepatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang tepat waktu dan tepat sasaran (%) | 78 | 80% | 85% | 88% | 90% | 93% | 95% | | |

2

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan Tolak ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut bisa terwujud/berhasil. Melalui tolak ukur tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi/cara sekaligus untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan-keputusan.

Arah kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pedoman strategis yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD secara optimal, baik dalam aspek administratif maupun operasional. Sekretariat DPRD berfungsi sebagai unsur pelayanan administratif dan teknis bagi DPRD. Oleh karena itu Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukannya arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan Dukungan Administratif dan Teknis terhadap Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPRD

- Menyediakan dukungan teknis penyusunan rancangan peraturan daerah dan naskah akademik secara profesional.
- Memfasilitasi penyusunan dan pembahasan anggaran daerah secara tepat waktu dan akurat.
- Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan dan anggaran.
- Penyediaan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD yang berkompeten

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia DPRD dan Sekretariat DPRD

- Meningkatkan kompetensi DPRD melalui Bimtek DPRD/Pendalaman Tugas DPRD/Orientasi DPRD.



- Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan teknis bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- Pengembangan manajemen ASN berbasis kompetensi dan kinerja.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Mengembangkan sistem informasi berbasis digital untuk mendukung penyelenggaraan rapat, dokumentasi, serta pengelolaan arsip dan produk hukum DPRD.
- Meningkatkan efisiensi komunikasi dan koordinasi antara anggota DPRD dan sekretariat melalui platform digital

4. Peningkatan Kualitas Fasilitas Kegiatan DPRD

- Menyediakan sarana dan prasarana rapat yang representatif dan modern.
- Mendukung kelancaran kegiatan reses, kunjungan kerja, dan jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD.

5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja DPRD

- Mendorong keterbukaan informasi publik terkait kegiatan DPRD.
- Menyusun laporan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD secara berkala yang mudah diakses oleh masyarakat.

6. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait

Stakeholder Terkait

- Membangun komunikasi efektif antara DPRD dan OPD dalam penyusunan Perda dan pengawasan program pembangunan.
- Memfasilitasi pertemuan-pertemuan koordinasi lintas sektor.
- Konsultasi/Koordinasi/Kunjungan Kerja DPRD ke Pusat, Provinsi dan Daerah lain

Tabel 3.1
Penetapan Renstra PD

| Tahap I 2026 | Tahap II 2027 | Tahap III 2028 | Tahap IV 2029 | Tahap V 2030 |
|---|--|--|--|---|
| Pemantapan dasar pelayanan Sekretariat DPRD | Peningkatan kualitas dukungan Tugas dan Fungsi DPRD | Penguatan efektivitas dan efisiensi pelayanan | Peningkatan standar kualitas pelayanan | Pemantapan capaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD |
| Peningkatan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta memperkuat dukungan | Penyempurnaan mekanisme kerja internal dan peningkatan kapasitas aparatur dan sarana dan Prasarana dalam | Optimalisasi sistem pelayanan serta peningkatan ketepatan waktu dan kualitas dukungan terhadap | Menjaga konsistensi mutu pelayanan dan memperkuat monitoring serta | Memastikan keberlanjutan kualitas layanan dan kesiapan menuju arah kebijakan periode berikutnya |



| Tahap I 2026 | Tahap II 2027 | Tahap III 2028 | Tahap IV 2029 | Tahap V 2030 |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| administrasi kedewanan | mendukung Tugas dan Fungsi DPRD | tugas dan fungsi DPRD | evaluasi kepuasan DPRD. | |

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja dari operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

| No. | Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RJMD | Arah Kebijakan Renstra PD | Ket |
|-----|--|--------------------------------------|--|-----|
| | Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Meningkatnya kualitas layanan publik | Penguatan Dukungan Administratif dan Teknis terhadap Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPRD | |
| | | | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia DPRD dan Sekretariat DPRD | |
| | | | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | |
| | | | Peningkatan Kualitas Fasilitas Kegiatan DPRD | |
| | | | Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja DPRD | |
| | | | Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait | |

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

Program dan kegiatan merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang diambil, guna mencapai tujuan yang diinginkan. Penyusunan Arah Kebijakan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini dituangkan program dan kegiatan strategis yang akan dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk selama kurun waktu tahun 2025 – 2029 sebagaimana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan disajikan dalam Tabel berikut :

**TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|--|--|--|---|----------------|--|---|--------------------|
| 4.02.0.00.0.00.04.0000 - Sekretariat DPRD | | | | | | | |
| - Meningkatkan kualitas layanan publik | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Meningkatnya kecepatan dan ketepatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | | Tingkat Kejuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (%) | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang tepat waktu dan tepat sasaran (%) | | |
| | | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai) | 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Dan Substansi | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

2

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|---|--------------------|
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | (08) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|-----------------|---|--|---|--------------------|
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 4.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|-----------------|---|--|--|--------------------|
| | | | | Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Dan Akurat | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|---|--|--|---|--------------------|
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 4.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 4.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |
| | | | | Tersediannya Hak Keuangan DPRD Yang Tepat Waktu Dan Akurat | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan | | Persentase Penetapan Perda APBD Tahun N (%) | 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | |
| | | | | | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%) | 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|-----------------|--|---|--|--------------------|
| | | | | Terlaksananya Pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen) | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang) | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen) | 4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------|---|---|--------------------|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 4.02.02.2.01.0004 - Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang) | 4.02.02.2.01.0006 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | |
| | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|--------------------|
| | | | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | |
| | | | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | 4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD | |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) | 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) | 4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | |

2

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|--|--|---|---|--------------------|
| | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan DPRD | | Persentase Sarana dan Prasarana yang layak (%) | 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD (Nilai) | 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 4.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|-----------------|---|--|--|--------------------|
| | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

2

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|-----------------|--|--|---|--------------------|
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan) | 4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 4.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | |
| | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------|--|---|--------------------|
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya | |
| | Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--------------------|
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | (08) |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | Tersedianya Pakaian dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|---|--|---|--|--------------------|
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | |
| | | | | Terlaksananya Medical Cek Up Untuk anggota DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 4.02.01.2.15 - Layanan Kesehatan dan Kesejahteraan DPRD | |
| | | | | Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD yang disediakan | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) | 4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD | |
| | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) | 4.02.01.2.16.0003 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | |
| | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket) | 4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan | | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%) | 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | |
| | | | | Terlaksananya Pembahasan Anggaran dan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|---|----------------|--|---|--------------------|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | 4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | |
| | | | Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen) | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|---|--------------------|
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan (Laporan) | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | 4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan (Laporan) | 4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen) | 4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|---|----------------|---|--|--------------------|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | 4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | |
| | | | Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) | 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang) | 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) | 4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang) | 4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | |
| | | | Terlaksananya pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD | | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | 4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01) | TUJUAN (02) | SASARAN (03) | OUTCOME (04) | OUTPUT (05) | INDIKATOR (06) | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07) | KETERANGAN (08) |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|---|--------------------|
| | | | | | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | 4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD | |

2

**TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------|--|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | 89.543.552.815,00 | | 89.935.264.532,00 | | 89.035.264.532,00 | | 96.310.264.532,00 | | 89.035.264.532,00 | | | |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 45.455.942.435,00 | | 45.847.654.152,00 | | 45.767.654.152,00 | | 52.467.654.152,00 | | 45.767.654.152,00 | | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai) | 80,6 | 80,7 | 80,8 | 33.747.442.435,00 | 80,9 | 34.139.154.152,00 | 81 | 34.139.154.152,00 | 81,2 | 34.139.154.152,00 | 81,5 | 34.139.154.152,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan DPRD | Persentase Sarana dan Prasarana yang layak (%) | 83 | 85 | 86 | 11.708.500.000,00 | 87 | 11.708.500.000,00 | 88 | 11.628.500.000,00 | 89 | 18.328.500.000,00 | 90 | 11.628.500.000,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD (Nilai) | 86,22 | 86,5 | 87 | | 87,5 | | 88 | | 88,5 | | 89 | | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD | |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | 44.087.610.380,00 | | 44.087.610.380,00 | | 43.267.610.380,00 | | 43.842.610.380,00 | | 43.267.610.380,00 | | | |
| Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan | Persentase Penetapan Perda APBD Tahun N (%) | 100 | 100 | 100 | 23.198.000.000,00 | 100 | 23.198.000.000,00 | 100 | 22.788.000.000,00 | 100 | 23.363.000.000,00 | 100 | 22.788.000.000,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD | |
| | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%) | 42,8 | 60 | 60 | | 60 | | 62 | | 62 | | 65 | | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD | |
| Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%) | 80 | 82 | 85 | 20.889.610.380,00 | 88 | 20.889.610.380,00 | 90 | 20.479.610.380,00 | 93 | 20.479.610.380,00 | 95 | 20.479.610.380,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD | |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 89.543.552.815,00 | | 89.935.264.532,00 | | 89.035.264.532,00 | | 96.310.264.532,00 | | 89.035.264.532,00 | | | |

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | 89.543.552.815,00 | 89.935.264.532,00 | | 89.035.264.532,00 | | 89.035.264.532,00 | | 96.310.264.532,00 | | 89.035.264.532,00 | | | | |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 45.455.942.435,00 | 45.847.654.152,00 | | 45.767.654.152,00 | | 45.767.654.152,00 | | 52.467.654.152,00 | | 45.767.654.152,00 | | | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai) | 80,6 | 80,8 | 33.747.442.435,00 | 80,9 | 34.139.154.152,00 | 81 | 34.139.154.152,00 | 81,2 | 34.139.154.152,00 | 81,5 | 34.139.154.152,00 | 4.02.000.000,00 - Sekretariat DPRD | | | |
| 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | | 245.000.000,00 | | 245.000.000,00 | | 245.000.000,00 | | 245.000.000,00 | | | | |
| Terusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Dan Subsiansi | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | N/A | 1 | 245.000.000,00 | 1 | 245.000.000,00 | 1 | 245.000.000,00 | 1 | 245.000.000,00 | 1 | 245.000.000,00 | | | | |
| | | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 245.000.000,00 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 12 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | |
| | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |

2

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | |
| (01) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 3 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | (14) | (15) |
| | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 3 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | | |
| 4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | | |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

2

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | | | |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 15.000.000,00 | 1 | 15.000.000,00 | 1 | 15.000.000,00 | 1 | 15.000.000,00 | 1 | 15.000.000,00 | | | | |
| 4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | | | |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 15.000.000,00 | 1 | 15.000.000,00 | 1 | 15.000.000,00 | 1 | 15.000.000,00 | 1 | 15.000.000,00 | | | | |
| 4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 90.000.000,00 | | 90.000.000,00 | | 90.000.000,00 | | 90.000.000,00 | | 90.000.000,00 | | | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | 12 | 4 | 90.000.000,00 | 4 | 90.000.000,00 | 4 | 90.000.000,00 | 4 | 90.000.000,00 | 4 | 90.000.000,00 | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | TARGET | PAGU | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 30.000.000,00 | 12 | 30.000.000,00 | 12 | 30.000.000,00 | 12 | 30.000.000,00 | 12 | 30.000.000,00 | 12 | 30.000.000,00 | | |
| 4.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | N/A | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | | |
| 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 3.502.442.435,00 | | 3.894.154.152,00 | | 3.894.154.152,00 | | 3.894.154.152,00 | | 3.894.154.152,00 | | 3.894.154.152,00 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 22 | 29 | 3.332.442.435,00 | 30 | 3.724.154.152,00 | 30 | 3.724.154.152,00 | 46 | 3.724.154.152,00 | 51 | 3.724.154.152,00 | 51 | 3.724.154.152,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | |
| 4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| | | | | 3.332.442.435,00 | | 3.724.154.152,00 | | 3.724.154.152,00 | | 3.724.154.152,00 | | 3.724.154.152,00 | | | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | 22 | 29 | 3.332.442.435,00 | 30 | 3.724.154.152,00 | 30 | 3.724.154.152,00 | 46 | 3.724.154.152,00 | 51 | 3.724.154.152,00 | | | | |
| Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Dan Akurat | | 2 | 1 | 170.000.000,00 | 1 | 170.000.000,00 | 1 | 170.000.000,00 | 1 | 170.000.000,00 | 1 | 170.000.000,00 | | | | |
| | | 6 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | |
| | | 24 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | |
| | | 100 | 126 | | 126 | | 126 | | 126 | | 126 | | | | | |
| | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |

2

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------|---------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| | Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| 4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | 126 | 60.000.000,00 | 126 | 60.000.000,00 | 126 | 60.000.000,00 | 126 | 60.000.000,00 | 126 | 60.000.000,00 | 126 | 60.000.000,00 | | |
| 4.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | | 4 | 70.000.000,00 | 4 | 70.000.000,00 | 4 | 70.000.000,00 | 4 | 70.000.000,00 | 4 | 70.000.000,00 | 4 | 70.000.000,00 | | |
| 4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | 1 | 7.500.000,00 | 1 | 7.500.000,00 | 1 | 7.500.000,00 | 1 | 7.500.000,00 | 1 | 7.500.000,00 | | | | |
| 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | 31.100.000.000,00 | | 31.100.000.000,00 | | 31.100.000.000,00 | | 31.100.000.000,00 | | 31.100.000.000,00 | | | | |
| Tersedianya Hak Keuangan DPRD Yang Tepat Waktu Dan Akurat | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 50 | 50 | 30.000.000.000,00 | 50 | 30.000.000.000,00 | 50 | 30.000.000.000,00 | 50 | 30.000.000.000,00 | 50 | 30.000.000.000,00 | | | | |
| 4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | 30.000.000.000,00 | | 30.000.000.000,00 | | 30.000.000.000,00 | | 30.000.000.000,00 | | 30.000.000.000,00 | | | | |
| Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 50 | 50 | 30.000.000.000,00 | 50 | 30.000.000.000,00 | 50 | 30.000.000.000,00 | 50 | 30.000.000.000,00 | 50 | 30.000.000.000,00 | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan DPRD | Persentase Sarana dan Prasarana yang layak (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD (Nilai) | 83 86.22 | 86 87 | 11.708.500.000,00 | 87 87,5 | 11.708.500.000,00 | 88 88 | 11.628.500.000,00 | 89 88,5 | 11.628.500.000,00 | 90 89 | 11.628.500.000,00 | | | | |
| 4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | |
| Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Subsistensi | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | N/A | 12 | 1.000.000,00 | 12 | 1.000.000,00 | 12 | 1.000.000,00 | 12 | 1.000.000,00 | 12 | 1.000.000,00 | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| 4.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | N/A | 12 | 1.000.000,00 | 12 | 1.000.000,00 | 12 | 1.000.000,00 | 12 | 1.000.000,00 | 12 | 1.000.000,00 | | | | |
| 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | | | | |
| Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | N/A | 4 | 260.000.000,00 | 4 | 260.000.000,00 | 4 | 260.000.000,00 | 4 | 260.000.000,00 | 4 | 260.000.000,00 | | | | |
| | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 25 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | | | | |
| | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | N/A | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | |
| 4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | | | | |
| Tersediannya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | N/A | 3 | 50.000.000,00 | 3 | 50.000.000,00 | 3 | 50.000.000,00 | 3 | 50.000.000,00 | 3 | 50.000.000,00 | | | | |
| 4.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------|----------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | N/A | 4 | 25.000.000,00 | 4 | 25.000.000,00 | 4 | 25.000.000,00 | 4 | 25.000.000,00 | 4 | 25.000.000,00 | 4 | 25.000.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 185.000.000,00 | | 185.000.000,00 | | 185.000.000,00 | | 185.000.000,00 | | 185.000.000,00 | | 185.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 25 | 30 | 185.000.000,00 | 30 | 185.000.000,00 | 30 | 185.000.000,00 | 30 | 185.000.000,00 | 30 | 185.000.000,00 | 30 | 185.000.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 80 | 5 | 314.500.000,00 | 5 | 314.500.000,00 | 5 | 314.500.000,00 | 5 | 314.500.000,00 | 5 | 314.500.000,00 | 5 | 314.500.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 20 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---|----------------|------------------|------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | | |
| 4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | (02) | (03) | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | (14) | (15) |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 3 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | | |
| 4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 76.500.000,00 | | 76.500.000,00 | | 76.500.000,00 | | 76.500.000,00 | | 76.500.000,00 | | 76.500.000,00 | | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 10 | 2 | 76.500.000,00 | 2 | 76.500.000,00 | 2 | 76.500.000,00 | 2 | 76.500.000,00 | 2 | 76.500.000,00 | 2 | 76.500.000,00 | 2 | | |
| 4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | | 20 | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | 1 | | |
| 4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 133.000.000,00 | | 133.000.000,00 | | 133.000.000,00 | | 133.000.000,00 | | 133.000.000,00 | | 133.000.000,00 | | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | 80 | 5 | 133.000.000,00 | 5 | 133.000.000,00 | 5 | 133.000.000,00 | 5 | 133.000.000,00 | 5 | 133.000.000,00 | 5 | 133.000.000,00 | 5 | | |
| Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat | | 20 | 3 | 608.000.000,00 | 3 | 608.000.000,00 | 3 | 608.000.000,00 | 3 | 608.000.000,00 | 3 | 608.000.000,00 | 3 | 608.000.000,00 | 3 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN | |
|--|---|---------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----|------------------|------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | | |
| | (02) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 32 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | (14) | (15) |
| | | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | | |
| | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | | |
| | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | | |
| 4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 185.000.000,00 | | 185.000.000,00 | | 185.000.000,00 | | 185.000.000,00 | | 185.000.000,00 | | 185.000.000,00 | | | | |
| Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 20 | 185.000.000,00 | 3 | 185.000.000,00 | 3 | 185.000.000,00 | 3 | 185.000.000,00 | 3 | 185.000.000,00 | 3 | 185.000.000,00 | 3 | 185.000.000,00 | | |
| 4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 35.000.000,00 | | 35.000.000,00 | | 35.000.000,00 | | 35.000.000,00 | | 35.000.000,00 | | 35.000.000,00 | | | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen) | 30 | 35.000.000,00 | 10 | 35.000.000,00 | 10 | 35.000.000,00 | 10 | 35.000.000,00 | 10 | 35.000.000,00 | 10 | 35.000.000,00 | 10 | 35.000.000,00 | | |

2

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----|----------------|------------------|------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | | |
| 4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu | (02) | (03) | | 145.000.000,00 | | 145.000.000,00 | | 145.000.000,00 | | 145.000.000,00 | | 145.000.000,00 | | 145.000.000,00 | | (14) | (15) |
| Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan) | | 12 | | 145.000.000,00 | 12 | 145.000.000,00 | 12 | 145.000.000,00 | 12 | 145.000.000,00 | 12 | 145.000.000,00 | 12 | 145.000.000,00 | | | |
| 4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 198.000.000,00 | | 198.000.000,00 | | 198.000.000,00 | | 198.000.000,00 | | 198.000.000,00 | | 198.000.000,00 | | | |
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | 32 | | 198.000.000,00 | 12 | 198.000.000,00 | 12 | 198.000.000,00 | 12 | 198.000.000,00 | 12 | 198.000.000,00 | 12 | 198.000.000,00 | | | |
| 4.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 | | | |
| Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | | 4 | | 45.000.000,00 | 4 | 45.000.000,00 | 4 | 45.000.000,00 | 4 | 45.000.000,00 | 4 | 45.000.000,00 | 4 | 45.000.000,00 | | | |
| 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah | | | | 430.000.000,00 | | 430.000.000,00 | | 430.000.000,00 | | 430.000.000,00 | | 430.000.000,00 | | 430.000.000,00 | | | |
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 3 | | 430.000.000,00 | 10 | 430.000.000,00 | 10 | 430.000.000,00 | 10 | 430.000.000,00 | 10 | 430.000.000,00 | 10 | 430.000.000,00 | | | |
| Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | | N/A | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------|----------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | N/A | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | N/A | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | |
| 4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 4 | | 0,00 | | | | 0,00 | 4 | | | | | 0,00 | | |
| 4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | N/A | | 0,00 | | | | 0,00 | 5 | | | | | 0,00 | | |
| 4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 100.000.000,00 | | | | 100.000.000,00 | | | | | | 100.000.000,00 | | |
| Tersedianya Mebel | | N/A | 3 | 100.000.000,00 | 3 | 100.000.000,00 | 3 | 100.000.000,00 | 3 | 100.000.000,00 | 3 | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| 4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 250.000.000,00 | | | | 250.000.000,00 | | | | | | 250.000.000,00 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | | 3 | 10 | 250.000.000,00 | 10 | 250.000.000,00 | 10 | 250.000.000,00 | 10 | 250.000.000,00 | 10 | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| | yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | N/A | 1 | 80.000.000,00 | 1 | 80.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 2.315.000.000,00 | | 2.315.000.000,00 | | 2.315.000.000,00 | | 2.315.000.000,00 | | 2.315.000.000,00 | | | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 36 | 36 | 2.315.000.000,00 | 36 | 2.315.000.000,00 | 36 | 2.315.000.000,00 | 36 | 2.315.000.000,00 | 36 | 2.315.000.000,00 | | | | |
| 4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 360.000.000,00 | | 360.000.000,00 | | 360.000.000,00 | | 360.000.000,00 | | 360.000.000,00 | | | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 36 | 24 | 360.000.000,00 | 24 | 360.000.000,00 | 24 | 360.000.000,00 | 24 | 360.000.000,00 | 24 | 360.000.000,00 | | | | |
| 4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.955.000.000,00 | | 1.955.000.000,00 | | 1.955.000.000,00 | | 1.955.000.000,00 | | 1.955.000.000,00 | | | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | 36 | 36 | 1.955.000.000,00 | 36 | 1.955.000.000,00 | 36 | 1.955.000.000,00 | 36 | 1.955.000.000,00 | 36 | 1.955.000.000,00 | | | | |



| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| | Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 5.030.000.000,00 | | 5.030.000.000,00 | | 5.030.000.000,00 | | 5.030.000.000,00 | | 5.030.000.000,00 | | | | |
| Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 140 | 100 | 5.030.000.000,00 | 100 | 5.030.000.000,00 | 100 | 5.030.000.000,00 | 100 | 5.030.000.000,00 | 100 | 5.030.000.000,00 | | | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 25 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | |
| | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 40 | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | | | | |
| 4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan | | | | 450.000.000,00 | | 450.000.000,00 | | 450.000.000,00 | | 450.000.000,00 | | 450.000.000,00 | | | | |



| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------|------------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | PAGU | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | Jumlah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | 5 | 450.000.000,00 | 5 | 450.000.000,00 | 5 | 450.000.000,00 | 5 | 450.000.000,00 | 5 | 450.000.000,00 | 5 | 450.000.000,00 | | |
| 4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 445.000.000,00 | | 445.000.000,00 | | 445.000.000,00 | | 445.000.000,00 | | 445.000.000,00 | | 445.000.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 25 | 30 | 445.000.000,00 | 30 | 445.000.000,00 | 30 | 445.000.000,00 | 30 | 445.000.000,00 | 30 | 445.000.000,00 | 30 | 445.000.000,00 | | |
| 4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 40 | 40 | 20.000.000,00 | 40 | 20.000.000,00 | 40 | 20.000.000,00 | 40 | 20.000.000,00 | 40 | 20.000.000,00 | 40 | 20.000.000,00 | | |
| 4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 115.000.000,00 | | 115.000.000,00 | | 115.000.000,00 | | 115.000.000,00 | | 115.000.000,00 | | 115.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 140 | 100 | 115.000.000,00 | 100 | 115.000.000,00 | 100 | 115.000.000,00 | 100 | 115.000.000,00 | 100 | 115.000.000,00 | 100 | 115.000.000,00 | | |
| 4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000.000,00 | | 4.000.000.000,00 | | 4.000.000.000,00 | | 4.000.000.000,00 | | 4.000.000.000,00 | | 4.000.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----|-------------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | 6 | 4.000.000.000,00 | 6 | 4.000.000.000,00 | 6 | 4.000.000.000,00 | 6 | 4.000.000.000,00 | 6 | 4.000.000.000,00 | 6 | 4.000.000.000,00 | (14) | (15) |
| 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | 31.100.000.000,00 | | 31.100.000.000,00 | | 31.100.000.000,00 | | 31.100.000.000,00 | | 31.100.000.000,00 | | 31.100.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Medical Cek Up Untuk anggota DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 39 | 50 | 100.000.000,00 | 50 | 100.000.000,00 | 5 | 100.000.000,00 | 5 | 100.000.000,00 | 5 | 100.000.000,00 | 50 | 100.000.000,00 | | |
| 4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 39 | 50 | 100.000.000,00 | 50 | 100.000.000,00 | 5 | 100.000.000,00 | 5 | 100.000.000,00 | 5 | 100.000.000,00 | 50 | 100.000.000,00 | | |
| Tersedianya Pakaian dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 6 | 5 | 1.000.000.000,00 | 5 | 1.000.000.000,00 | 5 | 1.000.000.000,00 | 5 | 1.000.000.000,00 | 5 | 1.000.000.000,00 | 5 | 1.000.000.000,00 | | |
| 4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 6 | 5 | 1.000.000.000,00 | 5 | 1.000.000.000,00 | 5 | 1.000.000.000,00 | 5 | 1.000.000.000,00 | 5 | 1.000.000.000,00 | 5 | 1.000.000.000,00 | | |
| 4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD | | | | 1.650.000.000,00 | | 1.650.000.000,00 | | 1.650.000.000,00 | | 1.650.000.000,00 | | 1.650.000.000,00 | | 1.650.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD yang disediakan | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket) | N/A | 2 | 1.650.000.000,00 | 2 | 1.650.000.000,00 | 2 | 1.650.000.000,00 | 2 | 1.650.000.000,00 | 2 | 1.650.000.000,00 | 2 | 1.650.000.000,00 | | |



| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) | 24 | 12 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | | | | |
| 4.02.01.2.16.0003 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 24 | 12 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | | | | |
| 4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | N/A | 2 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | | | | |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan | 80 | 85 | 44.087.610.380,00 | 44.087.610.380,00 | 20.889.610.380,00 | 20.889.610.380,00 | 43.267.610.380,00 | 43.267.610.380,00 | 20.479.610.380,00 | 20.479.610.380,00 | 43.842.610.380,00 | 20.479.610.380,00 | 4.02.00.00.000.04.0000 - Sekretariat DPRD | | | |
| 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pembahasan Anggaran dan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | 1 | 1 | 38.390.780,00 | 38.390.780,00 | 38.390.780,00 | 38.390.780,00 | 38.390.780,00 | 38.390.780,00 | 38.390.780,00 | 38.390.780,00 | 38.390.780,00 | 38.390.780,00 | | | | |
| Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBOUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|------|--------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| | APBD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS | | | | 6.819.600,00 | | 6.819.600,00 | | 6.819.600,00 | | 6.819.600,00 | | 6.819.600,00 | | 6.819.600,00 | | |
| Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 1 | 1 | 6.819.600,00 | 1 | 6.819.600,00 | 1 | 6.819.600,00 | 1 | 6.819.600,00 | 1 | 6.819.600,00 | 1 | 6.819.600,00 | | |
| 4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | 6.823.080,00 | | 6.823.080,00 | | 6.823.080,00 | | 6.823.080,00 | | 6.823.080,00 | | 6.823.080,00 | | |
| Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 1 | 1 | 6.823.080,00 | 1 | 6.823.080,00 | 1 | 6.823.080,00 | 1 | 6.823.080,00 | 1 | 6.823.080,00 | 1 | 6.823.080,00 | | |
| 4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD | | | | 8.997.500,00 | | 8.997.500,00 | | 8.997.500,00 | | 8.997.500,00 | | 8.997.500,00 | | 8.997.500,00 | | |
| Terlaksananya Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 1 | 1 | 8.997.500,00 | 1 | 8.997.500,00 | 1 | 8.997.500,00 | 1 | 8.997.500,00 | 1 | 8.997.500,00 | 1 | 8.997.500,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| 4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan | | | | 8.999.500,00 | | 8.999.500,00 | | 8.999.500,00 | | 8.999.500,00 | | 8.999.500,00 | | | | |
| Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | 1 | 1 | 8.999.500,00 | 1 | 8.999.500,00 | 1 | 8.999.500,00 | 1 | 8.999.500,00 | 1 | 8.999.500,00 | | | | |
| 4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | 6.751.100,00 | | 6.751.100,00 | | 6.751.100,00 | | 6.751.100,00 | | 6.751.100,00 | | | | |
| Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 1 | 1 | 6.751.100,00 | 1 | 6.751.100,00 | 1 | 6.751.100,00 | 1 | 6.751.100,00 | 1 | 6.751.100,00 | | | | |
| 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 10.344.137.000,00 | | 10.344.137.000,00 | | 10.344.137.000,00 | | 10.344.137.000,00 | | 10.344.137.000,00 | | | | |
| Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 1 | 1 | 10.344.137.000,00 | 1 | 10.344.137.000,00 | 1 | 10.344.137.000,00 | 1 | 10.344.137.000,00 | 1 | 10.344.137.000,00 | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Anggaran (Dokumen) | 13 | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------|------------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| | Pemeriksa Keuangan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan (Laporan) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| 4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | 1.557.742.000,00 | | 1.557.742.000,00 | | 1.557.742.000,00 | | 1.557.742.000,00 | | 1.557.742.000,00 | | | | |
| Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan | 14 | 14 | 1.557.742.000,00 | 14 | 1.557.742.000,00 | 14 | 1.557.742.000,00 | 14 | 1.557.742.000,00 | 14 | 1.557.742.000,00 | 14 | 1.557.742.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | 2.161.433.000,00 | | 2.161.433.000,00 | 2.161.433.000,00 | 2.161.433.000,00 | | 2.161.433.000,00 | | 2.161.433.000,00 | | | | |
| Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 14 | 14 | 2.161.433.000,00 | 14 | 2.161.433.000,00 | 14 | 2.161.433.000,00 | 14 | 2.161.433.000,00 | 14 | 2.161.433.000,00 | | | | |
| 4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | 1.665.762.000,00 | | 1.665.762.000,00 | 1.665.762.000,00 | 1.665.762.000,00 | | 1.665.762.000,00 | | 1.665.762.000,00 | | | | |
| Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | | 14 | 1.665.762.000,00 | 14 | 1.665.762.000,00 | 14 | 1.665.762.000,00 | 14 | 1.665.762.000,00 | 14 | 1.665.762.000,00 | | | | |
| 4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | 1.592.521.000,00 | | 1.592.521.000,00 | 1.592.521.000,00 | 1.592.521.000,00 | | 1.592.521.000,00 | | 1.592.521.000,00 | | | | |
| Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) | | 14 | 1.592.521.000,00 | 14 | 1.592.521.000,00 | 14 | 1.592.521.000,00 | 14 | 1.592.521.000,00 | 14 | 1.592.521.000,00 | | | | |
| 4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | |
| Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen) | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen) | 1 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 100.000.000,00 | (14) | (15) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | 2.583.887.000,00 | | | 2.583.887.000,00 | | | | 2.583.887.000,00 | | | 2.583.887.000,00 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | 13 | 13 | 2.583.887.000,00 | 13 | 2.583.887.000,00 | 13 | 2.583.887.000,00 | 13 | 2.583.887.000,00 | 13 | 2.583.887.000,00 | 13 | 2.583.887.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | 682.792.000,00 | | | 682.792.000,00 | | | | 682.792.000,00 | | | 682.792.000,00 | | |
| Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 1 | 1 | 682.792.000,00 | 1 | 682.792.000,00 | 1 | 682.792.000,00 | 1 | 682.792.000,00 | 1 | 682.792.000,00 | 1 | 682.792.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | 9.199.638.600,00 | | | 9.199.638.600,00 | | | | 9.199.638.600,00 | | | 9.199.638.600,00 | | |
| Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 3 | 3 | 9.199.638.600,00 | 3 | 9.199.638.600,00 | 3 | 9.199.638.600,00 | 3 | 9.199.638.600,00 | 3 | 9.199.638.600,00 | 3 | 9.199.638.600,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|--------|--------|------------------|------------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | TARGET | PAGU | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | | |
| | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 60.000 | | | | | | | | | | | 60.000 | | | |
| 4.02.02.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) | 7 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| | | | 60.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 793.216.000,00 | | | | | | | | | | | 793.216.000,00 | | | |
| Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) | 7 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| | | | 6.080.000,00 | | | | | | | | | | | 6.080.000,00 | | | |
| | | | 793.216.000,00 | | | | | | | | | | | 793.216.000,00 | | | |
| 4.02.02.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| | | | 6.080.000,00 | | | | | | | | | | | 6.080.000,00 | | | |
| | | | 6.080.000,00 | | | | | | | | | | | 6.080.000,00 | | | |
| Terselenggaranya Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| | | | 3.383.232.600,00 | | | | | | | | | | | 3.383.232.600,00 | | | |
| | | | 3.383.232.600,00 | | | | | | | | | | | 3.383.232.600,00 | | | |
| 4.02.02.05.0003 - Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| | | | 5.017.110.000,00 | | | | | | | | | | | 5.017.110.000,00 | | | |
| | | | 5.017.110.000,00 | | | | | | | | | | | 5.017.110.000,00 | | | |
| 4.02.02.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | 60.000 | 60.000 | | | | | | | | | 60.000 | | | | | |
| | | | 5.017.110.000,00 | | | | | | | | | | | 5.017.110.000,00 | | | |
| | | | 5.017.110.000,00 | | | | | | | | | | | 5.017.110.000,00 | | | |

2

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------|-------------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| | Peraturan Daerah (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | 1.307.444.000,00 | | 1.307.444.000,00 | | 897.444.000,00 | | 897.444.000,00 | | 897.444.000,00 | | | | |
| Terlaksananya pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | 13 | 12 | 1.307.444.000,00 | 12 | 1.307.444.000,00 | 12 | 897.444.000,00 | 12 | 897.444.000,00 | 12 | 897.444.000,00 | 12 | 897.444.000,00 | | |
| | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) | 0 | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD | | | | 410.000.000,00 | | 410.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Terusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) | 0 | 1 | 410.000.000,00 | 1 | 410.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | | | 897.444.000,00 | | 897.444.000,00 | | 897.444.000,00 | | 897.444.000,00 | | 897.444.000,00 | | 897.444.000,00 | | |
| 4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | 897.444.000,00 | | 897.444.000,00 | | 897.444.000,00 | | 897.444.000,00 | | 897.444.000,00 | | 897.444.000,00 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | 13 | 12 | 897.444.000,00 | 12 | 897.444.000,00 | 12 | 897.444.000,00 | 12 | 897.444.000,00 | 12 | 897.444.000,00 | 12 | 897.444.000,00 | | |
| | Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan | | | 23.198.000.000,00 | 100 | 23.198.000.000,00 | 100 | 22.788.000.000,00 | 100 | 23.363.000.000,00 | 100 | 22.788.000.000,00 | 100 | 22.788.000.000,00 | | |
| 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Penetapan Perda APBD Tahun N (%) | 100 | 100 | | 60 | | 62 | | 62 | | 65 | | | | | |
| | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%) | 42,8 | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan DPRD | | | | 15.333.000.000,00 | | 15.333.000.000,00 | | 14.923.000.000,00 | | 14.923.000.000,00 | | 14.923.000.000,00 | | 14.923.000.000,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan | 1 | 1 | 15.333.000.000,00 | 1 | 15.333.000.000,00 | 1 | 14.923.000.000,00 | 1 | 14.923.000.000,00 | 1 | 14.923.000.000,00 | 1 | 14.923.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | |
| (01) | (02) | (03) | | | | | | | | | | | | (14) | (15) | |
| | Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang) | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | |
| | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program | | | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | | |
| Pembentukan Peraturan Daerah | (02) | (03) | 1 | 230.000.000,00 | 1 | 230.000.000,00 | 1 | 230.000.000,00 | 1 | 230.000.000,00 | 1 | 230.000.000,00 | 1 | 230.000.000,00 | (14) | (15) | |
| Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 1 | 230.000.000,00 | 1 | 230.000.000,00 | 1 | 230.000.000,00 | 1 | 230.000.000,00 | 1 | 230.000.000,00 | 1 | 230.000.000,00 | 1 | 230.000.000,00 | | |
| 4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 13 | 3.000.000.000,00 | 8 | 3.000.000.000,00 | 8 | 3.000.000.000,00 | 8 | 3.000.000.000,00 | 8 | 3.000.000.000,00 | 8 | 3.000.000.000,00 | 8 | 3.000.000.000,00 | | |
| 4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen) | 0 | 93.000.000,00 | 1 | 93.000.000,00 | 1 | 93.000.000,00 | 1 | 93.000.000,00 | 1 | 93.000.000,00 | 1 | 93.000.000,00 | 1 | 93.000.000,00 | | |
| 4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 2 | 1.600.000.000,00 | 4 | 1.600.000.000,00 | 4 | 1.600.000.000,00 | 4 | 1.600.000.000,00 | 4 | 1.600.000.000,00 | 4 | 1.600.000.000,00 | 4 | 1.600.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | |
| 4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD | (02) | (03) | | 410.000.000,00 | | 410.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | (14) | (15) |
| Tersusunnya Tata Tertib DPRD | | 1 | 410.000.000,00 | 1 | 410.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| 4.02.02.2.01.0006 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | | | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | | | |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | | 0 | 10.000.000.000,00 | 80.000 | 10.000.000.000,00 | 80.000 | 10.000.000.000,00 | 80.000 | 10.000.000.000,00 | 80.000 | 10.000.000.000,00 | 80.000 | 10.000.000.000,00 | | | |
| 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | | | 4.020.000.000,00 | 4.020.000.000,00 | 4.020.000.000,00 | 4.020.000.000,00 | 4.020.000.000,00 | 4.020.000.000,00 | 4.020.000.000,00 | 4.020.000.000,00 | 4.020.000.000,00 | 4.020.000.000,00 | 4.020.000.000,00 | | | |
| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD | | 6 | 4.020.000.000,00 | 6 | 4.020.000.000,00 | 6 | 4.020.000.000,00 | 6 | 4.020.000.000,00 | 6 | 4.020.000.000,00 | 6 | 4.020.000.000,00 | | | |
| | | 52 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 2 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET (04) | PAGU (05) | TARGET (06) | PAGU (07) | TARGET (08) | PAGU (09) | TARGET (10) | PAGU (11) | TARGET (12) | PAGU (13) | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| | Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 4 | 28 | 28 | | | 28 | | 28 | | 28 | | | | | |
| | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 7 | 7 | 7 | | | 7 | | 7 | | 7 | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 1 | 14 | 14 | | | 14 | | 14 | | 14 | | | | | |
| 4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 575.000.000,00 | | 0,00 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | | |
| Terselenggaranya Orientasi DPRD | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 575.000.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD | | | 2.170.000.000,00 | 2.170.000.000,00 | | | 2.170.000.000,00 | | 2.170.000.000,00 | | 2.170.000.000,00 | | 2.170.000.000,00 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 4 | 28 | 28 | | | 28 | | 28 | | 28 | | 2.170.000.000,00 | | | |
| 4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | | |
| | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 6 | 6 | 6 | | | 6 | | 6 | | 6 | | 150.000.000,00 | | | |
| 4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | | | 320.000.000,00 | | 320.000.000,00 | | 320.000.000,00 | | 320.000.000,00 | | | |
| | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 7 | 7 | 7 | | | 7 | | 7 | | 7 | | 320.000.000,00 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| 4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | | | |
| Terselenggaranya Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | 2 | 12 | 15.000.000,00 | 12 | 15.000.000,00 | 12 | 15.000.000,00 | 12 | 15.000.000,00 | 12 | 15.000.000,00 | | | | |
| 4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | | | |
| Tersusunnya Rencana Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 1 | 14 | 15.000.000,00 | 14 | 15.000.000,00 | 14 | 15.000.000,00 | 14 | 15.000.000,00 | 14 | 15.000.000,00 | | | | |
| 4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | 1.350.000.000,00 | | 1.350.000.000,00 | | 1.350.000.000,00 | | 1.350.000.000,00 | | 1.350.000.000,00 | | | | |
| Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 52 | 16 | 1.350.000.000,00 | 16 | 1.350.000.000,00 | 16 | 1.350.000.000,00 | 16 | 1.350.000.000,00 | 16 | 1.350.000.000,00 | | | | |
| 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD | | | | 3.845.000.000,00 | | 3.845.000.000,00 | | 3.845.000.000,00 | | 3.845.000.000,00 | | 3.845.000.000,00 | | | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 4 | 4 | 3.845.000.000,00 | 4 | 3.845.000.000,00 | 4 | 3.845.000.000,00 | 4 | 3.845.000.000,00 | 4 | 3.845.000.000,00 | | | | |
| | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 13 | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan | 13 | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | |
| 4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | | | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | | |
| Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | |
| 4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | 2.085.000.000,00 | 2.085.000.000,00 | 2.085.000.000,00 | 2.085.000.000,00 | 2.085.000.000,00 | 2.085.000.000,00 | 2.085.000.000,00 | 2.085.000.000,00 | 2.085.000.000,00 | 2.085.000.000,00 | | | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | |
| 4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | 1.550.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | | | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | |

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | KETERANGAN | |
|--|--|--------|------------------|--------------|------|------|------|------|------------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 4.02.0.00.0.00.04.00000 - Sekretariat DPRD | | | | | | | | | | |
| I INDIKATOR KINERJA KUNCI | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Penetapan Perda APBD Tahun N | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | |
| 3 | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N | % | 42,8 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | |

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN | |
|--|--|--|---|---|--|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | |
| 4.02.0.00.0.00.04.0000 - Sekretariat DPRD | | | | | |
| 1. | 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | |
| | | | 4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | |
| | | | 4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | |
| | | | 4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | |
| | | | 4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | |
| | | | 4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD | | |
| | | | 4.02.02.2.01.0006 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran | |
| | | | | 4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS | |
| | | | | 4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | |
| | | 4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD | | | |
| | | 4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan | | | |
| | | 4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | |
| | | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | |
| | | 4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | |
| | | 4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | |
| | | 4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | |
| | | 4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | |
| | | 4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan | | | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|------|-------------------|---|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |
| | | | Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | |
| | | | 4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran | |
| | | | 4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan | |
| | | | Pertanggungjawaban Kepala Daerah | |
| | | Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | | | 4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD | |
| | | | 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD | |
| | | | 4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | |
| | | | 4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | |
| | | | 4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | |
| | | | 4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD | |
| | | | 4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD | |
| | | Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan | 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | |
| | | | 4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah | |
| | | | 4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | |
| | | | 4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses | |
| | | | 4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | |
| | | | 4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | |
| | | | 4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD | |
| | | | 4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD | |
| | | Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan | 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD | |
| | | | 4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | |
| | | | 4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | |
| | | | 4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | |
| | | | 4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | |

4.2 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD

Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk, maka indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk disajikan pada tabel :



**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|------|---|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 1. | 4.02.00.00.04.0000 - Sekretariat DPRD | | | | | | | | | |
| 2. | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | % | 86 | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | |
| 3. | Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang tepat waktu dan tepat sasaran | % | 78 | 80% | 85% | 88% | 90% | 93% | 95% | |

2

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|------|--|-----------|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | |
| 2. | Persentase Penetapan Perda APBD Tahun N | kumulatif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3. | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | positif | % | 80 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | | |
| 4. | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N | kumulatif | % | 42,8 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | |

2

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil (*result oriented*) dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

